



GEMA PERENCANA

Volume 2, Nomor 2, September - Desember 2023

Halaman 185 - 332

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK -----	i -x
ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP RENDAHNYA KINERJA PEGAWAI PELAKSANA PENGELOLA DATA KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	
Halidah -----	185 - 200
PENINGKATAN LAYANAN DALAM KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	
Zakiyul Fuad Zein -----	201 - 216
ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI KEKURANGAN PENGHULU DI INDONESIA	
Sarini -----	217 - 232
KEMUDAHAN DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAT MERUPAKAN SEBUAH KENISCAYAAN	
Obed Meiria Sulistiyono -----	233 - 244
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA IAIN MADURA DALAM KERANGKA KEUANGAN NEGARA	
Ahmad Fakhurraji -----	245 - 260
PENGARUH BELANJA JASA PROFESI DAN TRANSPOR LAYANAN PERNIKAHAN DI LUAR KANTOR TERHADAP BEBAN KINERJA DAN ANGGARAN DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2019-2022	
Hastomo Aji -----	261 - 274

PERAN AGEN MODERASI BERAGAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Eko Priyono ----- 275 - 290

PERAN STRATEGIS STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM
MENINGKATKAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA

Endang Kusnadi ----- 291 - 308

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
MADRASAH DI KABUPATEN KERINCI

Hamdi ----- 309 - 332

SALAM REDAKSI

Pembaca Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa-Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayat-Nya, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** ini dapat terbit kembali sebagai Edisi Lanjutan, yaitu: **Volume 2 Nomor 2, September-Desember 2023** setelah mendapatkan E-ISSN (*Electronic -International Standard Serial Number*) dari Pusat Nasional ISSN Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** telah terdaftar dan mendapatkan Nomor *Digital Object Identifier* (DOI) dari The Crossref.

Jurnal ini dalam pengelolaannya menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA. Kami berharap, pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih cepat, lebih efektif, dan lebih luas melalui media *online*. Di samping itu, Jurnal ini tetap dicetak secara *hardcopy*, walaupun dengan jumlah halaman dan tiras yang terbatas.

Pada **Volume 2 Nomor 2, September-Desember 2023** ini, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** menerbitkan 9 (sembilan) artikel, yang kesemuanya berasal dari para Perencana di lingkungan Kementerian Agama RI. Kesembilan artikel tersebut tersaji sesuai dengan ruang lingkup (*scope and focus*) yang telah ditetapkan Tim Editorial **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA**. Artikel-artikel yang tampil dalam Jurnal ini lebih menekankan pada kajian “Kebijakan Perencanaan” (*Policy paper*) bidang: Sosial, Ekonomi, Spasial, dan Pendidikan, dalam perspektif Agama dan Keagamaan.

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan maupun pengembangan pengetahuan di bidang kegiatan masyarakat.

Selamat membaca!

Jakarta, Desember 2023
Dewan Redaksi



LEMBAR ABSTRAK

Halidah

Perencana Ahli Muda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Email: halidahbanjarmasin@gmail.com

INGGRIS

POLICY ANALYSIS OF THE LOW PERFORMANCE OF EMPLOYEES IMPLEMENTING RELIGIOUS DATA MANAGEMENT IN THE OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS, HULU SUNGAI UTARA DISTRICT

This article is a policy paper resulting from analyzing and identifying the low performance of employees implementing Religious Data Management at the Office of the Ministry of Religious Affairs of North Hulu Sungai Regency. The problems encountered are: (1) Religious data managers do not yet have adequate expertise, skills and abilities; (2) The duties and functions of Religious Data Management Employees have not been carried out effectively and efficiently; and (3) Low discipline, loyalty and responsibility of Religious Data Managers in carrying out their duties. This article was written using a qualitative method with a descriptive analysis approach, to obtain relevant data according to the problem that was the object of study accompanied by secondary data analysis and direct interviews conducted in depth (in-depth interviews). In general, this policy analysis data shows that of the 13 districts/cities in South Kalimantan Province, the North Hulu Sungai Regency Ministry of Religious Affairs Office experienced delays in data collection until the specified deadline. This results in hampered performance of religious data, both at the Provincial Regional Office level and reporting at the central level. From the results and discussions, conclusions and policy recommendations were obtained in the form of: (1) Increasing the science and technology knowledge of Religious Data Management Implementing Employees; (2) Increase work creativity and innovation through ideas submitted; (3) Improve employee work discipline, especially regarding responsibilities according to duties and functions, referring to applicable work instructions and guidelines; (4) Carry out recruitment, both through PNS and PPPK channels for the formation of Functional Statistics Positions; and (5) Encouraging the appointment of Civil Servants to Functional Statistical Positions through the adjustment/Inpassing.

Keywords: Performance, Data Manager, Religious Data

INDONESIA

ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP RENDAHNYA KINERJA PEGAWAI PELAKSANA PENGELOLA DATA KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Artikel ini merupakan sebuah naskah kebijakan yang dihasilkan dari menganalisis dan mengidentifikasi rendahnya kinerja pegawai pelaksana Pengelola Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun permasalahan yang ditemui, yaitu: (1) Pengelola data keagamaan belum mempunyai keahlian, kecakapan, dan kemampuan yang memadai; (2) Tugas dan fungsi Pegawai Pelaksana Pengelola Data Keagamaan belum dijalankan secara efektif dan efisien; serta (3) Rendahnya disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab Pengelola Data Keagamaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, untuk mendapatkan data yang relevan sesuai masalah yang menjadi objek kajian disertai analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*). Secara garis besarnya, data analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami keterlambatan pengumpulan data hingga tenggat waktu yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya kinerja data keagamaan, baik di tingkat Kantor Wilayah Provinsi hingga penyampaian pelaporan di tingkat pusat. Dari hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berupa: (1) Menambah pengetahuan IPTEK para Pegawai Pelaksana Pengelola Data Keagamaan; (2) Menambah kreatifitas kerja dan inovasi melalui ide yang disampaikan; (3) Meningkatkan disiplin kerja pegawai, terutama pada tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi, mengacu pada petunjuk dan pedoman kerja yang berlaku; (4) Melakukan rekrutmen, baik melalui jalur PNS maupun PPPK untuk formasi Jabatan Fungsional Statistisi; serta (5) Mendorong pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui jalur penyesuaian/Inpassing.

Kata Kunci : Kinerja, Pengelola Data, Data Keagamaan

Zakiyul Fuad Zein

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: staintulungagung@gmail.com

INGGRIS

IMPROVING THE QUALITY SERVICES IN THE SHORTAGE OF HUMAN RESOURCES (HR)

This policy paper discusses the gap between the number of students and the number of academic staff at UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Excellent academic service must be supported by adequate quality and quantity of academic human resources (HR). As a Public Service University, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung provide both academic and non-academic services. To provide these services, adequate human resources are needed. Academic staff are the spearhead of services to the students and society in general. The author tries to find a solution to the rapid increase of the number of students which is not followed by the increase of the number of academic human resources. This condition causes the ratio of the number of students to the available academic staff to be less than ideal and has an impact on the quality of the services provided. Fast and friendly services are hard to achieve. Using descriptive qualitative methods, the author analyzes the sources of problems and looks for solutions to these problems. As a result, the author recommends: 1) the university leader limit the selection quota for new student admissions; 2) the university leader builds an application system that is integrated into one web, Android and IOS based database system; 3) the university leader involves other parties in providing certain services; and 4) the university leader uses the Management Cooperation (MC) method in managing the non-academic business so that available human resources can focus more on academic services as the core business of PSA of UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Keywords: Ratio of HR, Technology, Cooperation

INDONESIA

PENINGKATAN LAYANAN DALAM KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Policy paper ini membahas permasalahan ketimpangan antaramumlahmahasiswadenganjumlahtenagakependidikan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pelayanan yang baik harus didukung, baik kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kependidikan yang memadai. Sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menyelenggarakan layanan akademik maupun layanan non akademik. Untuk menyelenggarakan layanan tersebut, dibutuhkan adanya SDM yang memadai. Tenaga kependidikan merupakan ujung tombak pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Penulis mencoba untuk mencari solusi atas peningkatan pesat jumlah mahasiswa yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah SDM tenaga kependidikan. Kondisi ini menyebabkan rasio jumlah mahasiswa dengan tenaga kependidikan yang tersedia menjadi tidak ideal dan berimbas terhadap kualitas layanan yang diberikan. Layanan yang cepat dan ramah sulit untuk diwujudkan. Dengan metode kualitatif deskriptif, penulis melakukan analisis sumber-sumber permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Hasilnya, penulis merekomendasikan: 1) pimpinan memperketat kuota seleksi penerimaan mahasiswa baru; 2) pimpinan membangun sistem aplikasi yang terintegrasi ke dalam satu sistem database berbasis: web, Android, dan IOS; 3) pimpinan melibatkan pihak lain dalam penyelenggaraan layanan tertentu; dan 4) pimpinan menggunakan metode Kerja Sama Manajemen (KSM) dalam pengelolaan bisnis non akademik BLU, sehingga SDM yang tersedia bisa lebih fokus kepada layanan akademik sebagai core business BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kata Kunci : Rasio SDM, Teknologi, Kerja Sama

Sarini

Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan
E-mail: sarinikanwil@gmail.com

INGGRIS

ANALYSIS OF PRACTICES TO ADDICATE THE DEFICIT OF THE PRINCIPLE IN INDONESIA

This policy paper explains that, currently, Indonesia is experiencing a significant shortage of headmen. The available principals only reach 55% of the ideal number of requirements. This policy paper aims to recommend appropriate policies so that the needs of Penghulu in Indonesia can be met so that public services at KUA run smoothly and the Public Satisfaction Index with KUA services increases. This article was written using qualitative methods with a descriptive analysis approach to provide an in-depth picture of the problem of the shortage of chiefs and policies to overcome it. From the results and analysis of the strengths and weaknesses of each proposed policy, policy recommendations can be obtained that can be implemented by stakeholders.

Keywords: Penghulu, KUA, Recommendations, Policy

INDONESIA

ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI KEKURANGAN PENGHULU DI INDONESIA

Makalah kebijakan ini menguraikan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan penghulu dengan jumlah yang cukup signifikan. Penghulu yang tersedia hanya mencapai 55% dari jumlah kebutuhan yang ideal. Makalah kebijakan ini bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan yang tepat agar kebutuhan penghulu di Indonesia dapat terpenuhi, sehingga pelayanan publik di KUA berjalan dengan lancar dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan KUA meningkat. Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif agar memberikan gambaran yang mendalam terhadap permasalahan kekurangan penghulu dan kebijakan penanggulangannya. Dari hasil dan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing kebijakan yang diusulkan sehingga didapatkan rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan oleh para pemangku kebijakan.

Kata Kunci : Penghulu, KUA, Rekomendasi, Kebijakan

Jurnal Ilmiah **GEMA PERENCANA**, Volume 2, Nomor 2, September-Desember 2023; 217 - 232

Obed Meiria Sulistiyono

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
E-mail: obedmeiria@gmail.com

INDONESIA

THE EASE OF BUILDING A HOUSE OF WORSHIP IS A NECESSITY

This policy paper aims to obtain policy recommendations regarding the problem of establishing places of worship that are experiencing obstacles in the implementation process in the community. Regulations regarding the establishment of places of worship, namely Joint Regulations of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and Number 8 of 2006, actually become an obstacle due to conditions that are difficult to fulfill, especially for adherents of certain religions and beliefs. Embracing a religion or belief and worshiping in accordance with that religion or belief are human rights that must be protected by the state. This paper uses qualitative research methods by collecting data through interviews, observation, and documentation studies. The results of the study show that there are regulations that hinder the establishment of places of worship. Existing regulations cannot protect and facilitate the establishment of places of worship. Narrow religious understanding results in the absence of religious freedom in the process of establishing places of worship. There is a discriminatory attitude towards certain religions. There is still an understanding that adherents of certain religious minorities cannot build houses of worship in areas where adherents of the majority religion live. Therefore, a policy is needed that can make it easier and protect adherents of religions or beliefs from being able to build houses of worship in accordance with the teachings of their religion and beliefs. Continuous concrete action is also needed to foster religious moderation in society, namely an attitude of mutual respect and mutual cooperation between religious communities.

Kata Kunci: Policy, Moderation, Religion, Worship, Convenience

INGGRIS

KEMUDAHAN DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAT MERUPAKAN SEBUAH KENISCAAYAAN

Makalah kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan atas permasalahan pendirian rumah ibadat yang mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya di masyarakat. Peraturan tentang pendirian rumah ibadat, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 justru menjadi penghambat, dikarenakan kondisi persyaratan yang susah dipenuhi terutama bagi pemeluk agama dan kepercayaan tertentu. Memeluk suatu agama atau kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat adanya regulasi yang menjadi penghambat pendirian rumah ibadat. Regulasi yang ada tidak dapat mengayomi dan mempermudah pendirian rumah ibadat. Pemahaman keagamaan yang sempit menimbulkan tidak terjadinya kebebasan beragama dalam proses pendirian rumah ibadah. Adanya sikap diskriminatif terhadap agama tertentu. Masih adanya pemahaman bahwa penganut minoritas agama tertentu tidak bisa mendirikan rumah ibadat di lingkungan penganut agama mayoritas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat mempermudah dan melindungi para pemeluk agama atau kepercayaan untuk dapat membangun rumah ibadat sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya tersebut. Diperlukan juga sebuah tindakan nyata yang dilakukan terus-menerus untuk menumbuhkan moderasi beragama di masyarakat, yaitu sikap saling menghormati dan gotong-rojong antarumat beragama.

Keywords : Kebijakan, Moderasi, Agama, Ibadat, Kemudahan

Ahmad Fakhrrurraji
 Institut Agama Islam Negeri Madura
 E-mail: afakhrrurraji@gmail.com

INGGRIS

PLANNING AND BUDGETING AT IAIN MADURA WITHIN THE FINANCIAL OF STATE

This article describes planning and budgeting as a small part of the cycle of state financial management in Indonesia. IAIN Madura as a government agency and part of the State Islamic Religious College (PTKIN) under the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia continuously strives to improve the quality of state financial management amid the dynamics of the nation's economy through the planning and budgeting process. The purpose of this study is to determine the stages of planning and budgeting at IAIN Madura and to analyze it from the point of view of state finances. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection through observation and in-depth interviews with interested parties. The data used are planning and budgeting documents in the form of strategic plan documents, work plans, and DIPA, RKA-K/L. The results showed that IAIN Madura in the process of planning and budgeting had followed the rules and regulations that were in force. However, there are still programs and activities that need to be prioritized and aligned with the Institute's strategic plan and annual work plan and have not been socialized to campus residents, so it is recommended to the leadership of the Institute formulate policies that can be accessed by related work units, in the form of preparing standard operating procedures (SOP) and distributing information in the form of disseminating strategic plans and policy directions of the Institute to all academics as well as programs and work unit activities within IAIN Madura focusing on alignment to the strategic plan of the Institute

Keywords: Planning, Budgeting, State Financial

INDONESIA

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA IAIN MADURA DALAM KERANGKA KEUANGAN NEGARA

Artikel ini mengulas masalah perencanaan dan penganggaran merupakan sebagian kecil siklus pengelolaan keuangan negara di Indonesia. IAIN Madura sebagai salah satu instansi pemerintah dan bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia terus menerus berupaya meningkatkan mutu pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika perekonomian bangsa melalui proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tahapan perencanaan dan penganggaran di IAIN Madura serta menganalisis dari sudut pandang keuangan negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak berkepentingan. Data yang digunakan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berupa dokumen rencana strategis, rencana kerja dan DIPA, RKA-K/L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IAIN Madura dalam proses perencanaan dan penganggaran telah mengikuti kaidah dan peraturan perundangan yang berlaku. Namun masih terdapat program dan kegiatan yang perlu menjadi prioritas dan diselaraskan dengan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Institut dan belum tersosialisasikan kepada warga kampus, sehingga direkomendasikan kepada pimpinan Institut untuk merumuskan kebijakan yang dapat diakses oleh unit kerja terkait, berupa penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan melakukan distribusi informasi berupa sosialisasi rencana strategis dan arah kebijakan Institut kepada seluruh civitas akademika serta program dan kegiatan unit kerja dilingkungan IAIN Madura fokus pada penyelarasan terhadap rencana strategis Institut.

Kata Kunci : Perencanaan, Penganggaran, Keuangan Negara

Hastomo Aji

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
E-mail: hastomoaji@gmail.com

INGGRIS

THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL SERVICES AND TRANSPORTATION SPENDING BUDGET OUTSIDE MARRIAGE SERVICES ON THE PERFORMANCE AND BUDGET OF THE DIRECTORATE GENERAL OF ISLAMIC COMMUNITY GUIDANCE ON 2019-2022

This policy paper describes the influence of expenditure on professional services and transportation of celebrants at the District KUA, especially in out-of-office wedding services, on the performance and budget burden on the Directorate General of Islamic Community Guidance. This step is an effort to mitigate and resolve budgeting problems through the reconstruction of PNBPNR management. However, in its implementation, it turned out to conflict with several related policies. In studying this problem, the author uses a qualitative method as an interpretive method, because the research data is more concerned with the interpretation of data found in the field. In general, the data in this study shows that the initial aim of implementing the allocation of costs for professional services and transportation for marriage service officers outside the office was to minimize illegal fees and gratuities. This policy was implemented because the budget posture at the Directorate General of Islamic Community Guidance was unbalanced, where budget logistics from Pure Rupiah funding sources were mostly used for routine office operational expenditure, while the majority of non-operational activity allowances were charged to PNBPNR funding sources, whose budget revenues based on the number of wedding events held outside the office, so the planned work program will not be able to run if the source of PNBPNR revenue is not reached according to the target. However, the implementation of PNBPNR also gave rise to jealousy, because of the increase in the headman's coffers, because the headman had income from other sources besides salary, family allowances, food allowances, and performance allowances. The policy alternative is to recommend adjustments to functional allowances and head positions with the hope that income from professional services can be replaced by more relevant increases in official employee expenditure and avoid income disparities between employees within the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: Budget; PNBPNR; Religious Affairs office; Chief; Professional Services; Transport

INDONESIA

PENGARUH BELANJA JASA PROFESI DAN TRANSPOR LAYANAN PERNIKAHAN DI LUAR KANTOR TERHADAP BEBAN KINERJA DAN ANGGARAN DITJEN BIMAS ISLAM TAHUN 2019-2022

Makalah kebijakan ini menguraikan tentang pengaruh belanja jasa profesi dan transpor penghulu di KUA Kecamatan, khususnya dalam layanan pernikahan di luar kantor terhadap beban kinerja dan anggaran pada Ditjen Bimas Islam. Langkah ini sebagai salah satu upaya mitigasi dan penyelesaian problematika penganggaran melalui rekonstruksi manajemen pengelolaan PNBPNR. Namun dalam penerapannya, ternyata berbenturan dengan beberapa kebijakan yang terkait. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode *interpretive*, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Secara garis besarnya, data dalam kajian ini menunjukkan bahwa tujuan awal diterapkannya alokasi biaya jasa profesi dan transpor bagi petugas layanan nikah di luar kantor untuk meminimalisasi adanya pungutan liar dan gratifikasi. Kebijakan ini dilakukan, karena postur anggaran pada Ditjen Bimas Islam tidak seimbang, di mana logistik anggaran dari sumber dana Rupiah Murni lebih banyak dimanfaatkan untuk belanja rutin operasional kantor, sedangkan tunjangan kegiatan non-operasional mayoritas dibebankan pada sumber dana PNBPNR, yang penerimaan anggarannya berdasar pada jumlah peristiwa nikah yang dilaksanakan di luar kantor, sehingga rencana program kerja tidak akan dapat berjalan jika sumber penerimaan PNBPNR tidak tercapai sesuai target. Akan tetapi, penerapan PNBPNR ternyata juga memunculkan kecemburuan, karena bertambahnya pundi-pundi penghulu, karena penghulu memiliki penghasilan dari sumber lainnya selain gaji, tunjangan keluarga, uang makan, dan tunjangan kinerja. Adapun alternatif kebijakannya adalah merekomendasikan penyesuaian tunjangan fungsional dan jabatan penghulu dengan harapan pendapatan dari jasa profesi dapat tergantikan pada kenaikan belanja pegawai resmi yang lebih relevan serta menghindari disparitas pendapatan antarpegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Kata Kunci : Anggaran; PNBPNR; Kantor Urusan Agama; Penghulu; Jasa Profesi; Transpor

Eko Priyono

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
E-mail: ekotulungagung75@gmail.com

INGGRIS

THE ROLE OF RELIGIOUS MODERATION AGENTS IN INCREASING RELIGIOUS HARMONY

This policy paper reviews religious moderation as one of the Ministry of Religious Affairs priority programs as stated in the Ministry of Religious Affairs's Strategic Plan for 2020-2024. This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, where data is collected, grouped, and analyzed using descriptive analysis. Data shows that starting in 2019, the Ministry of Religious Affairs began pioneering programs to mainstream religious moderation to enlighten in the context of developing religious perspectives, attitudes, and practices with a middle way, creating and building peace, respecting diversity, respecting human dignity, and upholding adab, the glory of human life which is manifested in an attitude of life that is trustworthy, fair, full of compassion, tolerance, without discrimination, and mutual respect for diversity. In efforts to increase religious moderation, religious moderation agents are needed who act as agents who spread important echoes or echoes of the implementation of religious moderation in everyday social life, so that harmony can be created between and among religious communities. Thus, the author recommends strengthening religious moderation not only within the scope of the Ministry of Religious Affairs, Ministries/Institutions, and local governments, but it is also important to create religious moderation agents by involving stakeholders, such as religious leaders and community leaders in society.

Keywords: Religious Moderation, Harmony, Tolerance, Strategic Plan; Agent; Stakeholders

INDONESIA

PERAN AGEN MODERASI BERAGAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Makalah kebijakan ini mengulas tentang moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data menunjukkan bahwa diawali pada tahun 2019, Kementerian Agama mulai merintis program-program pengarusutamaan peningkatan beragama untuk mencerahkan dalam rangka pengembangan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan dengan jalan tengah, menciptakan dan membangun perdamaian, menghormati keragaman, menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi adab kemuliaan kehidupan manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup yang amanah, adil, penuh kasih sayang, toleransi, tanpa diskriminasi serta saling menghormati dalam keberagaman. Dalam upaya peningkatan moderasi beragama diperlukan agen-agen moderasi beragama yang bertindak sebagai agen yang menebarkan gema atau gaung penting pelaksanaan moderasi beragama di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sehingga dapat menciptakan kerukunan antar maupun inter umat beragama. Dengan demikian, penulis merekomendasikan penguatan moderasi beragama tidak saja di lingkup Kementerian Agama, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah, tetapi penting pula membuat agen-agen moderasi beragama dengan melibatkan para *stakeholders*, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Kerukunan, Toleransi, Renstra; Agen; *Stakeholder*

Endang Kusnadi

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
E-mail: endang.kusnadi1982@gmail.com

INGGRIS

STRATEGIC ROLE OF OUTPUT COST STANDARDS IN IMPROVING PERFORMANCE-BASED BUDGETING MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

This policy paper reviews the strategic role of Output Cost Standards in improving performance-based budgeting in the Ministry of Religious Affairs to improve the quality of budget planning. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach regarding the motives for implementing the Inspectorate General's Output Cost Standards and the motives for refusing to implement the Output Cost Standards in other units. This study is expected to provide accurate information about trends in the motives for implementing SBK. Apart from that, the author also wants to dig deeper by analyzing the effectiveness of the use of SBK at the Inspectorate General to support the role of Output Cost Standards in improving Performance-based budgeting in their units for the reasons: (1) knowing the motives for implementing Output Cost Standards in preparing and reviewing performance-based budgets, (2) evaluate the achievement of outputs and outcomes as well as the efficiency of implementing Output Cost Standards, and (3) analyze motive factors and evaluate Output Cost Standards in improving the quality of performance-based budgeting. The aspects studied show the: motives for implementing Output Cost Standards, evaluation of the implementation of Output Cost Standards at the Inspectorate General, and the strategic role of Output Cost Standards in improving Performance-based budgeting. Motive factors and evaluation of the implementation of the Output Cost Standard strengthen the urgency of its role in improving the quality of performance-based budgeting in terms of determining realistic performance targets, increasing accountability, reducing expenditure costs, strengthening transparency and participation, and encouraging improvement innovation. Thus, the author recommends that stakeholders be encouraged to better understand the urgency of SBK's strategic role in performance-based budgeting to be understood by all parties within the Ministry of Religious Affairs, starting from the highest level of leadership to implementers.

Keywords: Output Cost Standards, Motives, Evaluation, Performance-based budgeting

INDONESIA

PERAN STRATEGIS STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM MENINGKATKAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA

Makalah kebijakan ini mengulas tentang peran strategis Standar Biaya Keluaran dalam meningkatkan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas perencanaan penganggaran. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif tentang motif penerapan Standar Biaya Keluaran Inspektorat Jenderal dan motif keengganan penerapan Standar Biaya Keluaran pada unit selainnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kecenderungan motif penerapan SBK. Selain itu, penulis juga ingin menggali lebih mendalam dengan melakukan analisis efektivitas penggunaan SBK pada Inspektorat Jenderal untuk mendukung peran Standar Biaya Keluaran dalam meningkatkan Penganggaran Berbasis Kinerja pada unitnya dengan alasan: (1) mengetahui motif implementasi Standar Biaya Keluaran dalam penyusunan dan penelaahan anggaran berbasis kinerja, (2) evaluasi pencapaian *output* dan *outcome* serta efisiensi implementasi Standar Biaya Keluaran, dan (3) menganalisis faktor motif dan evaluasi Standar Biaya Keluaran dalam meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja. Aspek yang dikaji menunjukkan bahwa: motif implementasi Standar Biaya Keluaran, evaluasi implementasi Standar Biaya Keluaran pada Inspektorat Jenderal, dan peran strategis Standar Biaya Keluaran dalam meningkatkan Penganggaran Berbasis Kinerja. Faktor motif dan evaluasi implementasi Standar Biaya Keluaran memperkuat urgensi perannya dalam meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja dalam hal: menentukan target kinerja yang realistis, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi biaya pengeluaran, memperkuat transparansi dan partisipasi, dan mendorong inovasi perbaikan. Dengan demikian, penulis merekomendasikan kepada para stakeholders mendorong untuk lebih memahami urgensi peran strategis SBK dalam penganggaran berbasis kinerja untuk dipahami oleh semua pihak di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari level pimpinan yang tertinggi hingga pelaksana.

Kata Kunci : Standar Biaya Keluaran, Motif, Evaluasi, Penganggaran Berbasis Kinerja

Hamdi

Perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
E-mail: hamdikemenagkabkerinci@gmail.com

INGGRIS

MANAGEMENT POLICY OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) PROGRAM IN INCREASING THE QUALITY OF MADRASAH EDUCATION IN KERINCI DISTRICT

This policy paper reviews the School Operational Assistance Fund, or BOS for short, namely government funding for schools. The BOS funds are a form of the Indonesian government's attention to quality education, but in their management, there are still irregularities. Therefore, this article discusses BOS fund management policies to improve madrasa education and to minimize all forms of fraud and ineffectiveness in its management in Kerinci Regency. So, a strategy is needed to effectively manage BOS funds to improve the quality of madrasa education in Kerinci Regency. This article uses a qualitative writing method with a descriptive analysis approach to obtain relevant data according to the problem that is the object of study, accompanied by secondary data analysis and direct interviews conducted in-depth (in-depth interviews) with seven (seven) heads of Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, and Madrasah Aliyah, both public and private. The results of this study show that there is ineffectiveness in the management of BOS funds in Kerinci Regency due to non-compliance with procedures, weak comprehensive monitoring and evaluation, and inadequate public complaint tools for the misappropriation of funds. The Kerinci Regency Ministry of Religious Affairs Office has not yet prepared a public complaint tool for the misappropriation of BOS funds. To ensure that BOS funds are on target, socialization, evaluation, and monitoring are needed both internally and externally by the school. Transparent, accountable, and professional policies are very necessary.

Keywords: Policies, School Operational Assistance, Quality of Education, Madrasah, System Operational Procedures

INDONESIA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH DI KABUPATEN KERINCI

Makalah kebijakan ini mengulas tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah atau disingkat dengan BOS, yaitu pendanaan pemerintah untuk sekolah. Dana BOS tersebut adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap dunia pendidikan yang berkualitas, namun dalam pengelolaannya masih terdapat penyelewengan. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai kebijakan pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan pendidikan madrasah serta untuk meminimalisir segala bentuk penyelewengan dan ketidakefektifan dalam pengelolaannya di Kabupaten Kerinci. Maka diperlukan strategi dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci. Artikel ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, untuk mendapatkan data yang relevan sesuai masalah yang menjadi objek kajian disertai analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada 7 (tujuh) Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakefektifan dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kerinci akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur, lemahnya monitoring dan evaluasi yang komprehensif, serta tidak memadainya alat pengaduan masyarakat atas penyelewengan dana. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci belum menyiapkan alat pengaduan masyarakat atas penyelewengan dana BOS. Untuk memastikan dana BOS tepat sasaran, diperlukan sosialisasi, evaluasi, dan pemantauan baik dari internal maupun eksternal sekolah. Kebijakan yang transparan, akuntabel, dan profesional sangat diperlukan.

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah, Kualitas Pendidikan, Madrasah, Sistem Operasional Prosedur

